

DARI "KESEPIAN BERJEMAAH" KE "BONUS DEMOGRAFI"

BASIS

menembus fakta

FREDERICK RAY POPO

**Berharap
Bersama Kant**

JENNIE XUE

**AI dan Utopia
Kemanusiaan**

KLAUS HEINRICH RADITIO

**Asia Tenggara
adalah Koentji**

SINDHUNATA

**Sastra Perlawanan
Ludruk**

SANG IDOLA, 2023
karya SIGIT HANDARI



JURNALISME SERIBU MATA

BASIS

SIUPP No. 213/SK/MENPEN/SIUPP/D.1/1986.

Jo Ditjen PPG

Nomor 32/Ditjen/PPG/K/1996, 27 Maret 1996

Penerbit

Yayasan BP Basis

Anggota SPS ISSN: 0005-6188

Penasihat

Franz Magnis-Suseno

Pemimpin Umum

Sindhunata

Pemimpin Redaksi

A. Setyo Wibowo

Wakil Pemimpin Redaksi

A. Sudiarja

Dewan Redaksi

H. Hari Juliwati

Heru Prakosa

A. Bagus Laksana

Klaus Heinrich Raditio

Redaktur Pelaksana

C. Bayu Rianto

Redaktur

Setyaningsih

Dianita Bilyan

Francisca Prampriyanti

Redaktur Artistik

Hari Budiono

Sekretaris Redaksi

Anang Prampriyanto

Redaktur Iklan

Harun Riyadi, A. Yulianto

Yulianto

Administrasi / Distribusi

Francisca Triharyani

Kedangan

Widarti

Korresponden

Pringgodanuman

Telepon: 0822525421

Surat administrasi/distribusi

basis.adisti@gmail.com

Surat redaksi/kepada basis@gmail.com

Penyunting

Setyaningsih

Dianita Bilyan

Francisca Prampriyanti

Hari Budiono

Anang Prampriyanto

Yulianto

Widarti

Pringgodanuman

Surat administrasi/distribusi

basis.adisti@gmail.com

Surat redaksi/kepada basis@gmail.com

Penyunting

Setyaningsih

Dianita Bilyan

Francisca Prampriyanti

TANDA TANDA ZAMAN

A. Sudiarja

"Dari Kesenian Berjamaah" ke

"Bonus Demografi" ... 2

KACABENGKALA

Klaus Heinrich Raditio

Asia Tenggara adalah *Koentji* ... 7

FILSAFAT / **Frederick Ray Popo**

Berharap Bersama Kant ... 12

SASTRA ANAK / **Setyaningsih**

Memandang Bangsa dari

Si Doel dan Anak Desa ... 26

SOSIAL / **Franz Magnis-Suseno**

Menakutkan dan Mengkhawatirkan ... 30

SOSIAL / **Jennie Xue**

Al dan Utopia Kemanusiaan ... 33

SOSIAL / **Hari Suparwito**

Beriman dalam Dunia Modern.

Refleksi atas

Ensiklik *Antiqua et Nova* ... 37

SOSIAL / **Ahmadul Faqih Mahfudz**

Yang Terhormat Orang Kota ... 43

KESENIAN / **Dwi Oblo**

Pembuatan Keris di

Museum Keris Brojowuwono ... 49

KESENIAN / **Arisianto**

Goresan Juang Kemerdekaan ... 52

KESENIAN / **Sindhunata**

Sastra Perlawanan Ludruk ... 58

PUISI / **Petrus Nandi**

Man Kata-Kata di Kepalaku ... 63

PUISI / **Beda Holy Septiano**

Imaginas dalam Doa ... 64

Penghabisannya ... 65

Ke Langit ... 65

CERITA

Waktu yang



Lully Tutus, "Tirakat", 90x110, 2024, aoc.

Beberapa tahun belakangan kita merasakan dunia tidak baik-baik saja. Banyak perkara yang menimbulkan keresahan atau permasalahan yang sulit dicarikan pemecahannya.

Perang yang terjadi antara Rusia-Ukraina sejak invasi Rusia tanggal 24 Februari 2022, hingga kini belum berakhir, kemudian menyusul ketegangan perang antara Hamas, Palestina-Israel sejak 7 Oktober 2023 yang sebenarnya merupakan simpanan ketegangan lama yang muncul lagi dan lagi, meluas dengan keterlibatan Amerika dan Iran, Hizbullah di Lebanon selatan. Di benua lain, meletus perang antara Thailand-Kamboja. Perang dagang ekonomi Trump bikin perkara dengan tiba-tiba menaikkan tarif impor dari Cina dan beberapa negara lain. Belum lagi bencana alam, seperti gempa, tsunami, dan sebagainya di sana-sini, yang muncul dan hilang. Entah berita apa lagi yang akan menyusul mengguncangkan dunia kita. Keadaan yang tidak baik-baik saja ini tidak mengecualikan keadaan lokal, termasuk negara kita yang belakangan banyak isu tak sedap menyangkut keputusan-keputusan pemerintah yang menekan masyarakat, relasi-relasi sosial yang rapuh, berita-berita korupsi yang beruntun. Semua ini membuat suasana nyaris putus asa karena negara tidak mampu mengatasinya. Apakah ini merupakan corak zaman yang semakin tua?

Sudah lebih dari dua puluh tahun yang lalu, Zygmunt Bauman menulis *Life in Fragments* (1995) dan *The Individualized Society* (2001) yang melukiskan masyarakat yang semakin terpecah-pecah karena kecenderungan individualisme yang semakin marak dengan hasrat dan keinginan pribadi. Dua buku ini melukiskan kecenderungan manusia yang semakin individual, yang berakibat hilangnya etika. Hasrat dan keinginan bebas makin mengeras dan mengerucut dari kelompok-kelompok kecil hingga ke individu-individu. Setiap orang mengukur baik-buruk tindakan dan sikap menurut kepentingan dirinya sendiri, *in extenso*, kelompoknya sendiri, kalau masih ada ukuran itu. Tetapi, mana mau orang peduli lagi pada “yang lain”. Padahal, menurut

Bauman (2001: 72) mengutip Levinas, pada mulanya ada kendali diri dari setiap individu yang berupa inklinasi untuk bertanggung jawab pada “yang lain”, sebagai “saudara” (*my brother's keeper*).

Dalam epilog buku *Life in Fragments*, Bauman (op. cit. 1995: 270) menjelaskan bahwa perkembangan kecenderungan masyarakat yang seperti itu membuat semakin banyak orang terbawa oleh keluh kesah yang semakin personal individual, yang akhirnya juga menanggung urusan-urusan dan kesedihannya sendiri, bukan karena tak ingin membagikan cerita, tetapi karena sadar orang lain tak akan mau mendengarkan atau terlibat, tak mau tahu perkara dan urusan orang lain, seperti dirinya sendiri juga demikian. Kepedulian sosial yang barangkali masih berlaku dalam masyarakat, kata Bauman, hanya kewajiban membayar pajak karena dipaksa oleh negara. Itu pun kalau pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat. Tetapi, akhirnya kecenderungan itu pun disadari tak lebih dari kewajiban saja. Mungkinkah ada keringanan yang bergerak dari pajak pendapatan ke pajak konsumsi saja? Atau mungkin negara akan menjadi lebih baik dan tidak membebani masyarakat dengan pajak atau iuran untuk kepentingan bersama, karena semakin tidak jelas kepentingan bersama yang dimaksudkan ini, ketika masing-masing orang ingin mengurus kepentingannya sendiri-sendiri? Keadaan tidak baik-baik saja, sebenarnya bukanlah karena adanya suatu persoalan, karena ini sudah biasa. Akan tetapi, persoalannya, menurut Bauman, karena tidak ada pelaku (*agent*) yang mau memecahkannya. Negara tidak berbuat apa-apa karena tidak mampu menjadi pelaku yang bisa memecahkan persoalan. Kita berada dalam pesawat, sementara tidak ada orang yang duduk di *cockpit*, alias pesawat sebenarnya terbang autopilot, kata Bauman (2001: 111). Inilah situasi sosial dalam masyarakat pada zaman modern, yang disebut Bauman sebagai zaman modernitas cair (*liquid modernity*).

Dalam masyarakat modern yang solid (*solid modernity*), setidaknya ada hukum yang ditaati dan ada etika yang jelas. Segalanya masih teratur, rapi, tertata, disiplin, termasuk berlakunya etika bernegara, hidup bersama, bermasyarakat. Namun, sejak milenium baru, modernitas berubah cair karena masyarakat dan semakin banyak orang bergerak sendiri-sendiri, tidak hanya dalam arti fisik, seperti perpindahan penduduk karena imigrasi, pengungsian, petualangan (*vagabonds*), juga wisata dan peziarahan, semua campur aduk. Tidak jelas lagi antara tetangga dan musuh yang mengganggu. Akan tetapi, lebih dari itu juga secara mental, ternyata orang juga mudah berubah sikap, berganti minat, berpindah keyakinan dan pendirian. Hilanglah norma-norma yang pasti akibat percampuran masyarakat yang berlainan nilai-nilai dan kepentingannya ini. Masyarakatlah yang membuat etika menjadi hukum yang harus ditaati supaya tidak terjadi *chaos*, tetapi masyarakat juga yang sekarang menghindari kepastian hukum normatif yang menyatukan, karena ingin hidup secara lebih mandiri, individual. Ditarik secara global, maka hilang juga etika antarnegara dan kuasa pemerintahan.

Demikianlah negara demokrasi pun berubah, dari kepentingan partisipasi rakyat untuk kepentingan bersama, menjadi tuntutan-tuntutan hak dari masyarakat dan individu-individu yang minta diperhatikan negara. Menyruak pula identitas kelompok-kelompok yang juga menuntut pengakuan publik. Pengaturan bersama tidak berjalan, negara tidak peduli lagi untuk melindungi yang lemah, sementara masyarakat menjadi bingung karena ambivalensi nilai. Solidaritas masyarakat, walaupun ada, lebih karena ingin melawan (*against*) sesuatu kebijakan, daripada untuk (*for*) menyetujui kebersamaan (Bauman. 1995: 274). Singkat kata, masyarakat menjadi terpecah-pecah (*fragmented*). Maka, kalau terjadi peperangan, sebenarnya tidak jelas juga, siapa yang berperang dan melawan siapa?

Pada mulanya, privatisasi dan individualisasi di banyak hal sebetulnya memberikan kegembiraan. Itulah yang mereka inginkan, demi kebebasan untuk memilih dan memiliki, meski pada akhirnya mendatangkan kepedihan dalam bentuk kesepian karena ketidakpastian. Jadi, masyarakat yang terpecah-pecah tidak hanya kehilangan etika sebagai daya perekat-pemersatu, namun juga mendatangkan "kesepian". Laporan Jurnalisme Data, *Kompas* (30-31 Juli 2025), mengenai "kesepian" yang melanda penduduk di Indonesia, terutama yang masih aktif memproduksi, tampaknya merupakan gejala

yang meneguhkan sinyalemen ini, yakni masyarakat yang terindividualisasi dan semakin terpecah. Meskipun *Kompas*, berdasarkan jajak pendapat, menyebutkan bahwa "kesepian" dipicu oleh beban kerja atau studi, sering bermedia sosial dan jarang berinteraksi langsung, kehilangan orang terdekat atau kurangnya teman dekat untuk menjalin relasi dan tekanan ekonomi, namun tidak bisa disangsikan kiranya penyebab utamanya (dan bukan hanya pemicu) adalah perubahan struktur sosial yang semakin individual dalam masyarakat, di mana orang merasa sendirian di tengah banyak orang. Komunikasi melalui gawai dan media massa yang tidak "personal", hanya meneguhkan keadaan "kesepian berjemaah" yang semakin marak.

“

Pada mulanya, privatisasi dan individualisasi di banyak hal sebetulnya memberikan kegembiraan. Itulah yang mereka inginkan, demi kebebasan untuk memilih dan memiliki, meski pada akhirnya mendatangkan kepedihan dalam bentuk kesepian karena ketidakpastian.

Kesepian dilukiskan WHO sebagai “perasaan negatif ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan dalam hubungan sosial. Kesepian dan isolasi sosial adalah bentuk diskoneksi sosial” Selanjutnya WHO melaporkan, kesepian dan isolasi sosial meningkatkan risiko penyakit serius, seperti jantung, stroke, hipertensi, dan diabetes tipe 2 (*Kompas*, 30 Juli 2025: 15). Harian tersebut juga melaporkan bahwa “kesepian”, yang dialami oleh mereka yang sedang berada pada usia produktif, tidak hanya melemahkan kesehatan, melainkan juga mendatangkan kerugian akibat absensi kerja karena sakit yang terkait dengan “kesepian”, yang memicu hilangnya produktivitas warga sebesar lebih dari 600 triliun rupiah (*Kompas*, 31 Juli 2025: 1). Begitulah keadaannya.

Jikalau demikian, keadaan ini kiranya perlu menjadi pemikiran bagi orang-orang yang masih menaruh harapan pada apa yang mereka sebut sebagai bonus demografi Indonesia pada tahun mendatang, yakni periode di mana proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar daripada yang nonproduktif. Akan tetapi istilah bonus demografi ini kiranya perlu dipahami sebagai informasi mengenai statistik penduduk usia kerja, belum dan bukan bicara tentang kapabilitas (kemampuan) orang dalam berproduksi, karena kemampuan ini masih ditentukan oleh banyak faktor lain, selain usia. Untuk dapat menilai persoalan ini dengan lebih cermat, kiranya perlu dilakukan riset dan perhitungan yang mendalam mengenai bagaimana kapabilitas generasi tersebut menjadi aktual dalam hidup mereka, bagaimana kemampuan mereka sungguh berfungsi.

Sebagai pengantar untuk memikirkan bonus demografi ini, baik kiranya memahami konsep Pendekatan Kapabilitas (*Capability Approach*) dari Amartya Sen. Dalam *Commodities and Capabilities* (1999) dan banyak buku lain, Sen mengajukan teori Pendekatan Kapabilitas ini menggantikan Pendekatan Komoditas/Pendapatan yang mengukur kesejahteraan dengan mementingkan kebahagiaan dan terpenuhinya keinginan (*happiness and desire-fulfilment*) masyarakat. Penghasilan (*income*), keuntungan (*utility*), dan komoditas, serta terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok, menurut Sen, belum bisa dianggap sebagai ukuran dalam pengembangan kemanusiaan (*human development*) yang sesungguhnya. Tekanan pada GNP (*Gross National Product*) sebagai indikator kemajuan, sudah lama ditinggalkan karena tak terbukti memberi efek keadilan dan pemerataan (*trickle*

“

Secara singkat, pendekatan kapabilitas memusatkan diri pada apa yang mampu dilakukan individu secara nyata sehingga mampu berfungsi dan melakukan apa yang dia pilih untuk dirinya sendiri. Pendekatan ini memberi perhatian pada kebebasan individu dalam menentukan kebijakan untuk menetapkan apa yang merupakan kesejahteraan bagi dirinya.

down effect) bagi masyarakat. Bisa saja negara menghasilkan GNP yang besar meski masyarakat luas masih mengalami kemiskinan dan ketidakadilan.

Secara singkat, pendekatan kapabilitas memusatkan diri pada apa yang mampu dilakukan individu secara nyata sehingga mampu berfungsi dan melakukan apa yang dia pilih untuk dirinya sendiri. Pendekatan ini memberi perhatian pada kebebasan individu dalam menentukan kebijakan untuk menetapkan apa yang merupakan kesejahteraan bagi dirinya. Dalam hal ini, Amartya Sen menghindari kebutuhan yang bisa terjadi dalam Pendekatan Komoditas di mana orang mengejar kesuksesan tanpa memperhitungkan dari mana sumber keuntungan yang ia peroleh. Khususnya orientasi keuntungan (*utilitarian*), terkadang tanpa ia sadari mengakibatkan kerugian dan kesedihan orang lain (*offensive tastes*); dalam Pendekatan Kapabilitas sebaliknya dimungkinkan orang menjadi miskin bukan karena terpaksa atau diakibatkan oleh kerakusan yang lain, melainkan karena memang ia kehendaki demi yang lain.

Sen tidak mengingkari bahwa penghasilan dalam arti ekonomi atau komoditas memang perlu untuk pengembangan kebaikan manusia, demikian pun fasilitas-fasilitas yang meringankan kehidupan manusia, namun ini bukan ukuran. Dengan melihat kualitas kehidupan yang lebih luas, tampak bahwa apa yang dihasilkan orang bisa sangat berbeda menurut kapasitas masing-masing pribadi: orang yang sehat dan orang yang berkebutuhan khusus mempunyai kapasitas yang berbeda. Lagi pula, kepentingan yang dikejar orang pun berbeda, tergantung pada situasi, kondisi, kebiasaan, dan budaya setiap orang: kondisi anak-anak dan ibu yang hamil, misalnya, mempunyai kebutuhan yang berbeda. Kesejahteraan setiap orang tidak bisa diukur dari jaminan komoditas yang disediakan, tetapi harus diukur dari seberapa kemampuan/kapabilitas fungsi orang dalam disposisi mereka itu (David A. Clark, "The Capability Approach: Its Development, Critiques and Recent Advances" dlm. *GPRG/ Global Poverty Research Group*; <http://www.gprg.org/> diterbitkan kemudian dlm. *The Elgar Companion to Development Studies*, 2005).

Kepentingan Sen adalah memperhatikan kemampuan aktual yang berfungsi dalam hidup nyata. Dari perspektif ini, bonus demografi sama sekali belum memperlihatkan titik terang mengenai keuntungan apa-apa, ataupun arah kebijakan mengenai

kesejahteraan manusiawi yang mau dituju. Lagi pula, statistik ini masih menekankan pendekatan hasil (berproduksi) dan bukan pengembangan kemampuan manusia yang bervariasi (*human development*). Berbagai kebijakan ekonomi pemerintah hingga sekarang pun masih bisa dipertanyakan, apakah masih sekadar melipatgandakan produksi, mengembangkan konsumsi, yang sifatnya utilitarian, ataukah sudah mempertimbangkan kemanusiaan dari masyarakat sebagai pelaku-pelaku (*agents*) yang bebas? MBG, misalnya, dan berbagai macam bantuan sosial lainnya, merupakan pembagian komoditas yang hanya membuat masyarakat semakin tergantung pada pemerintah, belum lagi pelaksanaannya yang amburadul.

Memang, tidaklah mudah memahami apalagi menjalankan pendekatan Sen ini karena kepentingan individu dan kebebasan mendapatkan perhatian, lebih daripada sekadar pemenuhan hasil-hasil dalam ukuran ekonomi. Kapabilitas yang dimiliki seseorang dan dapat berfungsi bagi aktualisasi dirinya, merupakan hal yang paling penting. Maka, dalam bonus demografi, pertanyaan yang mendesak bukanlah seberapa mampu penduduk usia produktif itu berproduksi—meski ini pun merupakan pertanyaan yang belum tentu bisa dijawab—melainkan seberapa mereka mempunyai kapasitas yang fungsional, artinya yang sungguh-sungguh berfungsi, bukan kepandaian atau keterampilan ataupun simpanan keahlian yang tersekat dan tak bisa dijalankan karena berbagai permasalahan sosial, diskriminasi, ketidakadilan, atau birokrasi berbelit sebagaimana masih terjadi hingga saat ini. Maka, Pendekatan Kapabilitas sungguh merupakan pendekatan sosial yang menyeluruh karena menyangkut pembenahan struktur sosial dan keadilan.

Dengan memikirkan kembali sinyalemen Zygmunt Bauman mengenai "masyarakat yang terpecah-pecah" karena individualisasi dewasa ini, yang menyebabkan ketidakpastian dalam hidup bersama karena adanya krisis etika, tampaknya tantangan itu dapat dihadapi dengan Pendekatan Kapabilitas dari Amartya Sen yang mementingkan martabat (*dignity*) manusia karena penghargaan terhadap kebebasannya dalam menentukan sendiri. Tampaknya kedua pandangan itu bertautan, atau setidaknya tidak berseberangan. ●

A. Sudiarja,

Guru Besar filsafat di STF Driyarkara, Jakarta